BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Stunting merupakan ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia. Di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, prevalensi stunting meningkat tajam dari 72 kasus pada 2023 menjadi 243 kasus pada Mei 2025. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, meskipun kebijakan tersebut mendukung target nasional menurunkan stunting menjadi 18% pada 2025. Penelitian ini menemukan berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan tenaga gizi, belum adanya SOP penanganan stunting di Puskesmas, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketidaksinkronan data antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan kebijakan percepatan penurunan stunting, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diterapkan. Di antaranya yaitu, pemerataan intervensi gizi, penambahan tenaga gizi, penyusunan SOP, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi data, dan edukasi gizi berbasis komunitas. Implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Kecamatan Makassar.

B. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak, baik dari segi fisik, kognitif, hingga produktivitas di masa depan. Stunting juga menjadi indikator

penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Periode Emas atau 1000 Hari pertama kehidupan, terhitung sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia dua tahun , merupakan fase penting bagi tumbuh kembang anak . Perkembangan pesat yang terjadi pada periode ini akan berdampak pada masa depan anak (Sa'adah et al., 2024) . Anak yang mengalami Stunting cenderung memiliki tinggibadan lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mengalami gangguan perkembangan otak serta kesehatannya (Ayu et al., 2024) .

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah kasus stunting di Kecamatan Makassar terus meningkat, dari 72 kasus pada tahun 2023 menjadi 243 kasus pada Mei 2025. Peningkatan ini menandakan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah belum mampu menekan prevalensi stunting secara signifikan, khususnya di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Kecamatan Makassar. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 18% pada tahun 2025, namun untuk target Kota Makassar 18,8% pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Target ini menuntut seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat upaya penanganan stunting secara lebih serius, terintegrasi, dan berbasis data. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta sinergi lintas sektor di tingkat kota, Kecamatan , hingga kelurahan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Makassar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga gizi, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan stunting di

Puskesmas, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Meskipun kebijakan ini telah berjalan, peningkatan jumlah kasus stunting dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal dan belum mampu mendorong penurunan prevalensi secara signifikan menuju target 18,8% yang ditetapkan pemerintah pusat.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, ditemukan bahwa jumlah kasus stunting di Kecamatan Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pentingnya intervensi spesifik dan sensitif, serta pelibatan berbagai pihak dalam implementasinya.

Meskipun kebijakan ini telah dijalankan selama lebih dari satu tahun dan sejalan dengan target nasional menurunkan prevalensi stunting menjadi 18% pada tahun 2025, namun masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan di Kecamatan Makassar, antara lain:

1. Kebijakan Belum Berdampak Signifikan Terhadap Penurunan Kasus Stunting

   Salah satu masalah utama adalah bahwa kebijakan tersebut belum mampu menurunkan angka stunting secara nyata. Data menunjukkan peningkatan kasus dari 72 anak pada 2023 menjadi 243 anak pada Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang dirancang dan

hasil yang dicapai di lapangan. Intervensi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata, terutama di lorong-lorong padat penduduk yang justru menjadi wilayah dengan risiko tinggi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Dan Ketimpangan Distribusi Intervensi

   Jumlah tenaga gizi dan kader masih terbatas dan tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus dilayani. Beberapa Puskesmas hanya memiliki satu petugas gizi, sehingga pemantauan tumbuh kembang anak tidak maksimal. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan pemantauan di posyandu juga belum terlaksana secara rutin dan merata. Akibatnya, banyak anak yang tidak terdeteksi mengalami stunting pada tahap awal.

3. Belum Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Khusus Penanganan Stunting

   Hingga saat ini, Puskesmas yang ada di Kecamatan Makassar belum memiliki SOP khusus dalam penanganan stunting. Hal ini mengakibatkan perbedaan pelaksanaan antar wilayah dan kurangnya kejelasan dalam alur pelayanan. Ketiadaan SOP juga mempengaruhi proses rujukan, tindak lanjut, serta pelaporan kasus yang tidak seragam.

4. Kurangnya Koordinasi Pelaksana Di Lapangan

   Meskipun kebijakan ini menekankan kerjasama multisektor, namun koordinasi pihak kelurahan dan PKK, masih belum optimal. Akibatnya, penyampaian informasi ke masyarakat dan pelaksanaan kegiatan di lapangan jadi terhambat, karena belum semua pihak saling mendukung dan bekerja sama secara maksimal.

5. Ketidaksinkronan Data Antar Instansi

   Ketidaksinkronan data antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas, terutama terkait jumlah anak stunting, yang disebabkan oleh keterlambatan input

akibat kendala teknis seperti aplikasi yang error. Jadi, data yang masuk ke Dinas Kesehatan tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pencegahan Stunting

   Masih banyak orang tua yang belum memahami bahwa stunting bukan sekadar masalah tinggi badan, tetapi berdampak pada kecerdasan dan masa depan anak. Rendahnya kesadaran ini membuat partisipasi dalam kegiatan posyandu dan program gizi menjadi rendah. Beberapa orang tua bahkan tidak membawa anaknya secara rutin ke posyandu sehingga pemantauan tumbuh kembang tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Makassar, namun masih diperlukan pembenahan dalam implementasinya, baik dari segi sumber daya, mekanisme pelaksanaan, maupun keterlibatan masyarakat. Evaluasi menyeluruh dan penguatan kebijakan berbasis kondisi lapangan sangat dibutuhkan agar upaya penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata di Kecamatan Makassar.

D. Rekomendasi

1. Perluasan Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kecamatan Makassar

Pemerintah perlu memperluas cakupan pelaksanaan intervensi seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemantauan pertumbuhan balita, dan pemberian vitamin secara konsisten, terutama di wilayah-wilayah dengan kasus stunting tinggi. Intervensi harus menjangkau keluarga berisiko yang tinggal di lorong-lorong padat penduduk yang selama ini

belum tersentuh secara optimal.

2. **Penambahan Dan Pemerataan Tenaga Gizi Serta Penguatan Kapasitas Kader Posyandu**

   Puskesmas di Kecamatan Makassar memerlukan tambahan petugas gizi agar mampu menjangkau seluruh wilayah dengan beban kerja yang realistis. Selain itu, kader posyandu perlu diberikan pelatihan rutin dan insentif agar tetap termotivasi menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil serta balita.

3. **Penyusunan Dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Stunting Di Tingkat Puskesmas**

   Belum adanya SOP menjadi salah satu penyebab ketidakterpaduan layanan antar Puskesmas. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan SOP teknis yang menjadi acuan dalam proses identifikasi, rujukan, dan intervensi kasus stunting, sehingga pelaksana di lapangan memiliki panduan yang seragam dan terstruktur.

4. **Penguatan Komunikasi Dan Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Hingga Tingkat Kelurahan Dan RT/RW**

   Koordinasi antara Puskesmas, kelurahan, PKK, dan RT/RW harus diperkuat agar informasi dan kegiatan penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Penguatan komunikasi dapat dilakukan melalui Pertemuan rutin atau membuat dashboard digital sederhana (bisa Excel, Google Sheet, atau aplikasi lokal) yang memuat jadwal kegiatan, data balita stunting, dan progres aksi lapangan yang dapat diakses semua pelaksana (PKK, Puskesmas, kader, dan kelurahan).

5. **Optimalisasi Dan Pemanfaatan Data**

   Pemerintah dapat menyediakan aplikasi atau format digital yang dapat digunakan secara offline oleh kader atau petugas saat berada di lapangan. Data yang dikumpulkan akan tersimpan sementara, lalu secara otomatis disinkronisasi saat jaringan tersedia. Solusi ini mengatasi masalah konektivitas tanpa mengubah alur kerja yang ada. Untuk mempermudah implementasi, pelatihan singkat dan pendampingan teknis dapat dilakukan secara bertahap di tingkat kelurahan atau Puskesmas. Sistem ini lebih praktis dibanding membuat sistem baru, dan tetap memungkinkan data yang akurat dan real-time tanpa tergantung terus-menerus pada internet.

6. **Peningkatan Edukasi Gizi Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pencegahan Stunting**

   Rekomendasi ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan edukasi gizi berbasis komunitas yang dilakukan secara langsung dan partisipatif. Kegiatan seperti penyuluhan keliling di lorong-lorong dan kampanye gizi yang melibatkan kader, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi. Sebagai bagian dari edukasi berkelanjutan, dengan membuat Poster Edukasi Gizi yang memuat informasi penting seperti manfaat kunjungan ke posyandu, contoh makanan bergizi seimbang, serta bahaya stunting bagi tumbuh kembang anak. Setiap rumah yang memiliki balita dianjurkan menempelkan poster tersebut di tempat yang sering terlihat. Penyebaran poster dapat dilakukan oleh kader posyandu saat kunjungan rumah atau dibagikan saat kegiatan posyandu. Pembentukan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting sejak dini.

E. Referensi

Sa'adah, H. D., Kurniasih, E., & Komalawati, R. (2024). Edukasi Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Meningkatkan Status Gizi Balita Di Dsn. Ngronggi, Ds. Grudo, Kab. Ngawi. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, *7*(2), 468–476.

Ayu, P., Syamsuddin, S., Ap, A. R. A., Multazam, A. M., & K, E. P. K. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Makassar Khususnya Wilayah Kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala. *Window Of Public Health Journal*, *5*(5), 694–707.

Kementarian Kesehatan. 2024. Survei Status Gizi Indonesia Dalam Angka 2024.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.